

**TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA
DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEKANISME
*CORPORATE GOVERNANCE***



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

TIKA WULANDARI
B 200 060 100

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konservatisme merupakan konvensi laporan keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut sebagai prinsip akuntansi dominan. Konvensi seperti konservatisme menjadi pertimbangan dalam akuntansi dan laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilingkupi ketidakpastian (Dewi, 2004:208).

Sampai sekarang konservatisme tetap mempunyai peran penting dalam praktik akuntansi. Sebagaimana dikatakan Lasdi (2008), meskipun dalam kondisi tidak adanya aturan dan regulasi yang memerintahkan pelaporan secara konservatif, manajer perusahaan mempunyai insentif untuk melaporkan laporan keuangan secara konservatif.

Dalam standar akuntansi manajer diperbolehkan secara fleksibel memilih metode maupun estimasi akuntansi yang akan digunakan dalam kondisi/transaksi yang sama, sehingga memungkinkan perusahaan dapat memilih metode yang dirasa paling tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Menurut Dewi (2003), Lo (2005:398), Widya (2004:696) dan Lasdi (2008), beberapa metode maupun estimasi akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menyebabkan konservatisme dalam pelaporan keuangan adalah:

1. PSAK No. 1 (revisi 1998) tidak mengatur ketentuan mengenai taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dalam penyajian laporan keuangan, padahal terdapat berbagai macam cara estimasi kerugian piutang.
2. PSAK No. 13 mengenai akuntansi untuk investasi, menyatakan bahwa dapat ditentukan berdasarkan FIFO, rata-rata tertimbang, dan LIFO. Nilai pasar dapat ditentukan berdasarkan nilai portofolio agregat, dalam total atau menurut urutan kategori investasi, atau investasi individual, secara konsisten.
3. PSAK No. 14 memberikan kebijakan kepada manajemen untuk menghitung biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), rata-rata tertimbang, atau Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP).
4. PSAK No. 16 mengizinkan manajemen untuk mengestimasi masa manfaat suatu aktiva tetap berdasarkan pertimbangan yang berasal dari pengalaman perusahaan ketika menggunakan aktiva serupa. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat yang digunakan.
5. PSAK No. 17 mengizinkan manajemen memilih metode penyusutan untuk mengalokasikan jumlah aktiva yang bisa disusutkan dengan suatu dasar sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola yang diharapkan atas manfaat keekonomian dan secara konsisten digunakan dari periode ke periode kecuali terdapat perubahan dalam pola yang diharapkan atas manfaat ekonomis aktiva tersebut.

6. PSAK No. 19 meminta manajemen untuk memilih metode amortisasi garis lurus untuk aktiva berwujud, kecuali jika suatu perusahaan mempunyai metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan secara teratur untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Periode amortisasi harus dapat dievaluasi oleh perusahaan secara teratur untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi selanjutnya menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang telah ditentukan. Pada umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak berwujud tidak melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva dapat digunakan.

Sedangkan contoh konservatisme (tetapi tidak seluruhnya merupakan konservatisme) menurut Pernyataan Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang di atur meliputi:

1. PSAK No. 20 standar ini selain mengatur kapitalisasi biaya riset dan pengembangan, juga meminta pembebanan langsung biaya riset dan pengembangan yang tidak memberikan manfaat ekonomis di masa depan pada periode terjadinya. Sehingga manajer hanya dapat sedikit melakukan diskresi atau tidak sama sekali terhadap pelaporan keuangan saat pengeluaran dilakukan.
2. PSAK No. 57 (Revisi 2000) memperkenankan perusahaan mengakui kewajiban estimasian tapi tidak memberikan peluang pengakuan kemungkinan adanya aktiva estimasian.

Hal ini memungkinkan manajer perusahaan untuk melaporkan secara konservatif laporan keuangannya. Perbedaan industri serta preferensi manajer

atas motivasi memilih prosedur akuntansi menimbulkan pendapat bahwa ada berbagai tingkatan konservatisme yang diterapkan dalam kondisi/transaksi yang sama, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang dirasa paling tepat diterapkan dalam perusahaan tertentu, seperti yang telah disebutkan di atas.

Sampai saat ini masih terjadi pertentangan mengenai manfaat konservatisme dalam laporan keuangan. Juanda (2007) menyatakan dikalangan para peneliti, prinsip konservatisme akuntansi masih di anggap sebagai prinsip yang kontroversial.

Sebagian peneliti berpendapat bahwa laba yang dihasilkan dari metode yang konservatif kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak bermanfaat, sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Peneliti yang memiliki pandangan kedua menganggap bahwa laba konservatif yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh oleh perusahaan sehingga laba yang disusun dengan metode yang konservatif tidak merupakan laba yang “dibesar-besarkan” nilainya, sehingga dapat dianggap sebagai laba yang berkualitas (Dewi, 2004:208).

Ada beberapa cara dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan konservatisme, dianggap sebagai kelemahan konservatisme, sehingga beberapa peneliti meragukan manfaat konservatisme. Penelitian Dewi (2004:210-211) dan Mayangsari dan Wilopo (2002:291-292) memaparkan konservatisme tidak bermanfaat dan konservatisme bermanfaat.

Konservatisme tidak bermanfaat dipicu oleh beberapa definisi seperti yang diuraikan oleh Basu (dalam Dewi. 2004:211), konservatisme didefinisikan sebagai akuntansi yang mengakui kos dan kerugian lebih cepat, mengakui pendapatan dan keuntungan lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Sehingga konservatisme dianggap sebagai sistem akuntansi yang bias.

Hendriksen (1992:77) menyatakan bahwa sebaik-baiknya konservatisme, dia merupakan metode yang sangat buruk dalam memperlakukan adanya ketidakpastian dalam penilaian dan laba. Dan sejelek-jeleknya, dia sama sekali mengakibatkan distorsi atas data akuntansi. Konservatisme mempengaruhi kualitas angka-angka yang dilaporkan di neraca maupun dalam laporan laba rugi.

Ketika perusahaan meningkatkan jumlah investasi, maka akuntansi konservatif akan menghasilkan perhitungan laba yang lebih rendah dibandingkan akuntansi optimis/liberal. Akuntansi konservatif juga akan menciptakan cadangan yang tidak tercatat sehingga memungkinkan manajemen lebih leluasa melaporkan angka laba di masa datang. Kondisi ini mendukung simpulan bahwa pelaporan keuangan itu sama sekali tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa alasan konservatisme berkaitan dengan *contracting theory*. Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun dengan luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk

membesar-besarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas aktiva perusahaan.

Konservatisme dapat berperan mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan deviden yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk menghindari konflik, manajemen cenderung menggunakan akuntansi yang lebih konservatif. Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global, termasuk di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Widya (2004:703) dalam penelitiannya.

Berdasarkan teori *efficient contracting* maka konservatisme menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan pada masa mendatang. Dengan kata lain pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip konservatisme.

Mayangsari dan Wilopo (2002:304) dengan menggunakan *C-Score* sebagai proksi konservatisme membuktikan bahwa konservatisme memiliki *value relevance*, sehingga laporan keuangan perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme dapat mencerminkan nilai pasar perusahaan.

Pemilihan metode akuntansi yang konservatif tidak terlepas dari kepentingan pihak manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan kesejahteraan pemegang sahamnya. Atau yang biasa di

sebut sebagai *problem* keagenan. Dengan demikian dukungan manajemen terhadap konservatisme diduga berkaitan dengan motivasi ini. Manajer yang berkomitmen untuk melaporkan secara konservatif laporannya dianggap dapat mengurangi biaya keagenan (Lasdi, 2008).

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976:310). Hubungan tersebut menyebabkan manajer memiliki insentif untuk mengambil informasi apapun dari laba laporan yang akan berpengaruh negatif terhadap kompensasinya. Pemegang klaim yang rasional akan mengurangi kompensasi manajerial melalui pengaruh ekspektasian dari penyalahgunaan jabatan tersebut (Lasdi, 2008).

Corporate governance merupakan mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajer melalui konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervisi* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *shareholder* lainnya (Ujiantho dan Pramuka, 2007).

Secara umum mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Pertama, adalah mekanisme internal spesifik

perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang terdiri atas aturan hukum dan dasar pengendalian korporat. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* akan berkaitan dengan independensi komisaris, kepemilikan oleh manajemen dan keberadaan komite audit.

Komisaris independen berfungsi dalam menjalankan fungsi *monitoring* yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Dalam menjalankan fungsinya, komisaris akan membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas (Wardhani, 2008:7). Dengan adanya intensifitas *monitoring* yang dilakukan komisaris independen akan menekan sifat manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif).

Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Dengan demikian kepemilikan oleh manajer akan mempengaruhi pilihan manajemen terhadap konservatisme. Dalam penelitian Widya (2004:704) dengan menggunakan proksi struktur kepemilikan perusahaan,

menemukan hubungan positif antara *corporate governance* perusahaan dan konservatisme akuntansi.

Aspek lain dalam *corporate governance* adalah keberadaan komite audit dalam perusahaan. Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan termasuk prinsip konservatisme. Keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit memberikan kontribusi terhadap tingkat *monitoring* yang lebih besar oleh anggota komite audit tersebut sehingga akan meningkatkan tingkat konservatisme yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan.

Dengan memperhatikan penelitian Ratna Wardhani (2008), penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ratna Wardhani (2008). Perbedaan ini terletak pada periode penelitian. Periode penelitian Ratna Wardhani (2008) adalah tahun 2003 – 2006, sedangkan periode penelitian ini lebih panjang yaitu tahun 2005-2007.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas. Penulis mengambil judul **“TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE”**

B. Perumusan Masalah

Penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah mekanisme *corporate governance* akan meningkatkan konservatisme perusahaan. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi dari komisaris berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?
2. Apakah kepemilikan oleh manajemen berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?
3. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian tingkat konservatisme disini berdasarkan pada implementasi mekanisme *corporate governance* dan dalam penelitian ini berkaitan dengan independensi dari komisaris, kepemilikan oleh manajemen, dan keberadaan komite audit.
2. Perusahaan sampel yang akan diteliti adalah perusahaan publik khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur tersebut memiliki nilai buku ekuitas positif dalam kurun waktu 2005 – 2007.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris bahwa independensi dari komisaris berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris bahwa kepemilikan oleh manajemen berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat :

1. *Bagi pengembangan ilmu pengetahuan*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh implementasi *corporate governance* terhadap praktik tingkat konservatisme di Indonesia.
2. *Bagi praktisi*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruh implementasi *corporate governance* dan implikasinya bagi investor.

3. *Bagi akademisi*, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang juga tertarik membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan mekanisme *corporate governance* ini akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diterangkan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konservatisme akuntansi dan implementasi *corporate governance*, tinjauan tentang independensi komisaris, tinjauan tentang kepemilikan perusahaan oleh manajemen, dan tinjauan tentang komite audit.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknis dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasannya serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.